

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*) menjadi kajian penting dalam Hubungan Internasional (HI). Bantuan ini merujuk pada bantuan pendanaan yang diberikan oleh suatu negara untuk mendukung perekonomian dan keamanan, demi stabilitas politik negara lain melalui kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) atau kerjasama internasional. Menurut pandangan Lauri D, agenda bantuan luar negeri dalam HI berfungsi sebagai instrumen untuk mempengaruhi dan mendorong kebijakan tertentu, serta mendukung kepentingan nasional (*National Interest*) negara pendonor di kancah internasional (Lauri, 2020).

Sejalan dengan pandangan Bindra, bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai bantuan dana atau jenis bantuan lainnya yang disediakan oleh negara maju. Negara-negara ini memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, dengan tujuan untuk membina dan memperkuat hubungan antar negara (Bindra, 2018). Adapun peneliti HI yang berpendapat bahwa negara-negara memanfaatkan berbagai alat untuk melindungi kepentingan nasional dan mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Alat-alat tersebut mencakup diplomasi, perdagangan, sanksi ekonomi, kekuatan militer, dan penggunaan bantuan luar negeri. Dengan demikian, strategi ini menunjukkan bagaimana negara-negara berusaha memaksimalkan pengaruh mereka di dunia internasional (Apodaca, 2017).

Selain itu, bantuan luar negeri melibatkan konsep regional. Bantuan ini merupakan aspek penting untuk mendukung negara-negara yang terkena dampak konflik, krisis politik, serta tantangan sosial dan ekonomi. Negara-negara bekerja sama untuk memberikan dukungan kepada negara-negara tertentu dalam wilayah geografis, khususnya negara-negara yang terkena dampak konflik dan negara-negara berkembang. Itu artinya bantuan luar negeri

memberikan kontribusi bantuan yang signifikan yang disalurkan ke negara penerima di suatu negara atau wilayah (Salois, 2013).

Membahas lebih lanjut mengenai bantuan luar negeri yang ditujukan ke negara-negara yang terdampak konflik dan negara berkembang, bantuan luar negeri dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketergantungan negara penerima pada bantuan luar negeri. Menurut para ahli dengan pandangan liberal, hubungan antara negara-negara inti (pendonor) dan (penerima) perifer ini diartikan sebagai hubungan interdependensi, di mana kedua pihak berada dalam posisi yang saling memerlukan (Santos, 1970). Menurut Carnegie & Marinov, hal ini sejalan dengan bantuan luar negeri mengenai hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan. Bantuan luar negeri ini dapat mengatasi permasalahan isu kemanusiaan yang terjadi di suatu wilayah, bantuan ini mengalir ke negara-negara yang membutuhkan bantuan kemanusiaan (Carnegie et al, 2017).

Sejak akhir Perang Dingin pada akhir tahun 1980-an, Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi sorotan dalam konteks politik global (Fathun, 2017). Dalam bukunya “Teaching Human Rights”, Jan Materson, seorang anggota Komisi HAM PBB, menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang inheren dan esensial bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan yang layak. Prinsip utama dari HAM adalah pemberian perlakuan yang adil dan setara kepada setiap orang tanpa mempertimbangkan jenis kelamin mereka. Dengan kata lain, prinsip fundamental hak asasi manusia adalah kesetaraan dan keadilan bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin (Sinaga,2018).

Sejalan dengan prinsip dasar HAM tersebut, bantuan luar negeri yang ditujukan dalam konteks perempuan memiliki berbagai tujuan, salah satunya adalah bantuan yang berkontribusi dalam menegakkan hak asasi perempuan, dengan mendukung organisasi dan inisiatif yang berupaya memastikan hak-hak perempuan diakui, dilindungi, dan dihormati. Donor bantuan luar negeri dalam konteks perempuan ini ingin mengurangi kesenjangan gender dengan berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Pickbourn & Ndikumana, 2016).

Perlu diperhatikan bahwa sebagian besar orang masih memiliki kesalahpahaman terkait gender dan seks. Kedua istilah tersebut memang berhubungan, akan tetapi memiliki definisi yang berbeda satu sama lain. Dikutip dalam (Karim, 2014). Secara umum, istilah seks mengacu pada perbedaan fisik dan biologis antara pria dan wanita, termasuk perbedaan dalam struktur tubuh, hormon, dan sistem reproduksi. Di sisi lain, gender merujuk pada peran dan norma sosial, budaya, dan adat istiadat yang terkait dengan pria dan wanita. Ini adalah karakteristik yang diberikan kepada kedua kelompok tersebut oleh masyarakat dan budaya mereka. Wanita biasanya dipandang sebagai individu yang lembut, emosional, dan memiliki naluri maternal, sementara pria sering dilihat sebagai individu yang kuat, rasional, dan maskulin.

Menurut Abdullah, menegaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang mencakup peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh masyarakat bagi pria dan wanita. Peran ini tidak tetap, tetapi dapat berubah dan beradaptasi seiring berjalannya waktu dan berdasarkan konteks geografis dan budaya. Ini berarti bahwa konsep gender dibentuk oleh norma sosial, nilai-nilai, tradisi, dan budaya lokal, dan oleh karena itu, dapat berubah dan dipertukarkan (Abdullah, 2013).

Dari pemaparan di atas, telah diketahui bahwa gender melibatkan sejumlah individu antara laki-laki dan perempuan. Tapi nyatanya isu terkait gender lebih banyak menyerpa perempuan dibandingkan laki-laki di banyak negara. Selanjutnya, ketidaksetaraan dan ketidakadilan tersebut kemudian disuarakan oleh feminisme dalam HI (Steans et al., 2010).

Para peneliti HI yang mengadopsi perspektif feminisme menemukan hubungan antara tingkat kesetaraan gender di suatu negara dengan karakteristik kebijakan luar negerinya. Secara khusus, negara-negara yang mencapai level kesetaraan gender yang lebih baik cenderung memiliki kebijakan luar negeri yang kurang agresif atau lebih cenderung ke arah diplomasi dan kerjasama ketimbang tindakan yang bersifat konfrontatif atau bermusuhan (Williams, 2017).

Untuk merespons isu ketidaksetaraan gender, banyak negara berupaya meningkatkan kesetaraan gender secara global dengan berbagai langkah dan

tindakan. Amerika Serikat (AS) adalah salah satu negara yang aktif memperjuangkan kesetaraan gender. Sejak abad ke-19, AS menjadi tempat lahir dan berkembangnya gerakan feminisme, yaitu gerakan yang menuntut hak-hak perempuan dan menentang ketidakadilan yang dialami perempuan dibandingkan dengan laki-laki (Meiliana, 2012).

AS juga mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek kebijakan luar negerinya, termasuk dalam memberikan bantuan luar negeri. Sejak akhir Perang Dunia II, AS telah menjadi negara pendonor terbesar di dunia dan menggunakan bantuan luar negerinya untuk mencegah negara-negara “menjadi komunis” dengan memberikan bantuan pembangunan, bantuan militer, dan bantuan kemanusiaan (White, 2000). Menurut Lauri, AS menggunakan *Foreign Aid as Foreign Policy* untuk mencapai *National Interest* di negara-negara sasaran (Lauri D, 2020).

Salah satu fokus bantuan luar negeri AS adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kerja sama pembangunan. Kesetaraan gender juga menjadi bagian dari dialog pembangunan sejak periode 1975-1985, yang ditandai oleh lahirnya UN Women sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, bantuan luar negeri AS tidak hanya berperan sebagai alat diplomasi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk mendukung gerakan feminisme yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi berbasis gender (Bali Swain et al., 2020).

Membahas lebih lanjut mengenai bantuan luar negeri AS, penting untuk memahami bahwa negara ini memiliki sejarah yang panjang dalam memberikan bantuan luar negeri dalam konteks regional, khususnya di Kawasan Timur Tengah. Sejak tahun 1946, AS telah memberikan sekitar \$350 miliar untuk membantu kawasan ini. Bantuan ini diberikan untuk mendukung berbagai tujuan kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) AS. Yaitu melawan terorisme, mengatasi konflik, dan mempromosikan hak asasi manusia. Akibatnya, bantuan ini juga dikhususkan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang kompleks yang berasal dari negara-negara terdampak konflik (Sharp M. Jeremy et al., 2020).

Sejalan dengan bantuan luar negeri AS ke Afghanistan dimulai setelah invasi yang dilakukan AS ke negara tersebut pada tahun 2001, hal ini ditandai sebagai respon terhadap serangan 9/11 yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda. AS ingin menggulingkan kelompok radikal Taliban yang diduga bersekutu dengan Al-Qaeda. Tujuan utama invasi tersebut adalah untuk menghilangkan ancaman teroris dan menciptakan keamanan regional dan global, juga membawa stabilitas dan demokrasi ke Afghanistan, namun hal ini malah menyebabkan konflik berkepanjangan (Anugerah & Purba, n.d).

Dikutip dalam (Muttamimah, 2022) bahwa Afghanistan sering kali menghadapi pergolakan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Ironisnya, pergolakan tersebut telah menjadi kejadian berulang, dengan konflik bersenjata yang memakan banyak korban jiwa terus-menerus terjadi untuk merebut kekuasaan. Konflik antara AS dan Taliban ini telah menjadi banyak sorotan pada periode sejak abad ke-16 hingga abad ke-21 saat ini. Konflik AS dan kelompok radikal Taliban menimbulkan banyak kerusakan, sehingga AS merasa berkewajiban secara moral untuk memberikan bantuan kemanusiaan (*Humanitarian Action*) ke Afghanistan.

Bantuan kemanusiaan adalah salah satu instrumen bantuan internasional yang bertujuan untuk memenuhi norma hubungan internasional yang mengharuskan negara maju membantu negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara penerima bantuan kemanusiaan (Lancaster, 2007). Pada bulan Agustus 2021, AS di bawah pemerintahan Joe Biden membuat kebijakan untuk menarik seluruh pasukan militer AS untuk meninggalkan Afghanistan (Schweitzer & Eran, 2021). Presiden Joe Biden memutuskan untuk menghentikan konflik dua dekade di Afghanistan dengan cara menarik seluruh kekuatan militer Amerika Serikat dari wilayah tersebut. Selama periode ini, AS telah mengeluarkan banyak sumber daya, baik finansial maupun non-finansial.

Meski AS telah berupaya memulihkan Afghanistan, hasil yang signifikan belum terlihat. Hal ini dianggap sebagai indikasi kegagalan Amerika Serikat dalam mencapai perdamaian di negara tersebut. Keputusan ini membawa berbagai konsekuensi, khususnya bagi keamanan Afghanistan. Meski Amerika

Serikat telah berada di Afghanistan selama bertahun-tahun, pemerintah Afghanistan tetap lemah dan sangat bergantung pada bantuan keuangan dari AS (Anugerah, 2022).

Kehadiran AS telah menciptakan ketergantungan yang mendalam dari pemerintah Afghanistan dalam berbagai aspek (Anugerah & Purba, 2021). Tanpa melibatkan pemerintah Afghanistan dalam negosiasi perdamaian, AS memutuskan untuk menarik semua pasukannya dari negara tersebut, suatu keputusan yang diterima oleh pemerintah Afghanistan tanpa perlawanan. Keputusan ini dimanfaatkan oleh Taliban, yang menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih kota-kota besar dan menjatuhkan pemerintahan demokratis Afghanistan, Taliban dengan cepat menguasai wilayah-wilayah di Afghanistan hingga pedesaan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat (Putri Leniana et al., 2023).

Dikutip dari Brookings, setelah terjadinya kesepakatan perdamaian antara Taliban dan AS serta penarikan pasukan militer AS di Afghanistan. Siapapun yang mengenal kelompok Taliban mengetahui bahwa moderasi Taliban hanyalah sebuah impian belaka mengingat pelanggaran-pelanggaran yang tidak sekali kelompok tersebut lakukan. Seperti yang diduga, Taliban menolak untuk memoderasi kebijakan hingga akhirnya pemerintah AS tidak mengembalikan dana ke bank sentral Afghanistan sampai pihak Bank dapat menunjukkan independensi politik dari Taliban, Taliban berjanji untuk membentuk pemerintahan yang lebih inklusif, terutama terkait partisipasi perempuan, tapi nyatanya banyak ketidakpastian terkait hak-hak perempuan. PBB telah menggelar sidang khusus untuk membahas keadaan HAM di Afghanistan (Brookings, 2022).

Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, menegaskan bahwa berbagai hak perempuan di Afghanistan telah dilanggar oleh Taliban, yang bertentangan dengan janji yang mereka buat sebelumnya, termasuk membatasi perempuan untuk berada di rumah dan mencegah anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, perempuan juga dilarang keluar rumah kecuali jika mereka mengenakan kerudung penuh dan ditemani oleh anggota keluarga laki-laki terdekat. Ini semua dilakukan untuk mengendalikan perilaku

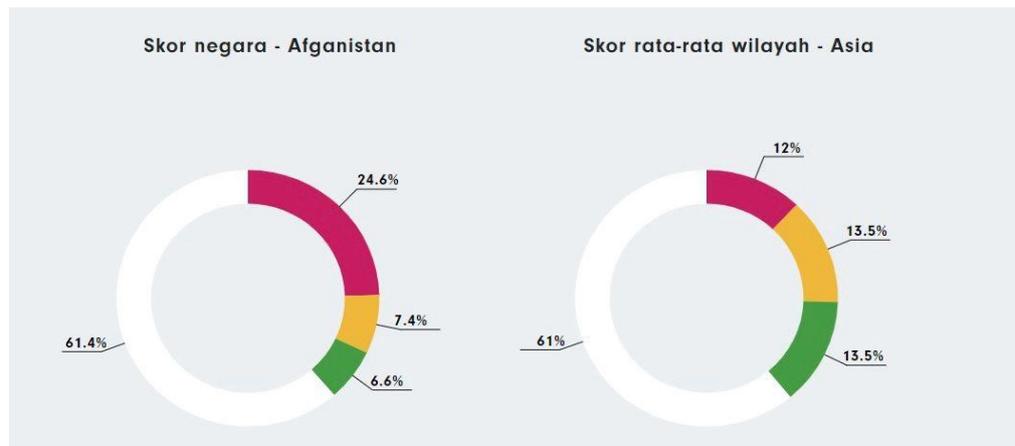
perempuan. Serta pelanggaran lainnya yang membatasi hak-hak perempuan (Dewi & Utari, 2022).

Membahas mengenai pembatasan hak-hak perempuan yang terjadi di suatu negara, hal ini berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender. Menurut laporan indeks kesetaraan gender global yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, melalui data tersebut adanya *benchmarking* tahunan terhadap negara-negara berdasarkan perkembangan gender yang mempengaruhi partisipasi ekonomi, peluang pencapaian pendidikan dan kesehatan. Afghanistan merupakan salah satu negara menduduki peringkat terendah dalam hal kesetaraan gender pada tahun 2021-2022. Indeks kesetaraan gender global, yang mengevaluasi 146 negara berdasarkan empat kriteria utama yaitu akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik, bertujuan untuk memberikan ukuran yang dapat diandalkan setiap tahun untuk menilai perkembangan sepanjang waktu. Pada tahun 2021, skor rata-rata indeks kesetaraan gender global berdasarkan 156 negara yang ditinjau dalam laporan tersebut adalah 67,7%, yang berarti masih ada kesenjangan sebesar 32,3% yang perlu diatasi (Crotti et al., 2022).

Meski pada tahun 2022 terjadi peningkatan skor menjadi 68,1%, peningkatan ini tidak berarti bagi Afghanistan. Negara ini justru menempati posisi terendah dalam indeks tersebut, berada di peringkat 146 dari 146 negara pada tahun 2021 dan turun menjadi peringkat 156 dari 156 negara pada tahun 2022. Fakta ini menegaskan bahwa Afghanistan memiliki jurang kesetaraan gender terlebar di antara semua negara yang diteliti dalam laporan tersebut (Mundial. et al., 2022).

Afghanistan juga dinyatakan sebagai negara dengan kesenjangan gender tertinggi di kawasan Asia. Data menunjukkan bahwa pendapatan, partisipasi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan perempuan Afghanistan jauh di bawah rata-rata laki-laki, serta mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Menurut data yang dilansir dari website resmi UN Women Gender data gaps and country performance (2020) :

Gambar 1. 1 Gender Data Gaps and Countries performance



Sumber : (UN WOMEN, 2020)

Data ini merujuk pada indikator spesifik gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang digunakan untuk mengukur kesenjangan gender serta status perempuan dan anak perempuan di kawasan Asia. Skor ini dihitung berdasarkan 72 indikator dengan arah “positif”, yang berarti semakin tinggi skornya, semakin baik kondisinya. Indikator ini diterapkan pada 193 Negara Anggota PBB. Untuk setiap indikator, dihitung persentil distribusi ke-33 dan ke-66. Berdasarkan nilai-nilai ini, negara-negara kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori performa: tinggi (dibedakan dengan warna hijau), sedang (dibedakan dengan warna kuning), dan rendah (dibedakan dengan warna merah). Dengan demikian, data ini memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang status gender di berbagai negara.

Kesetaraan gender adalah isu penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, peringkat rendah Afghanistan dalam indeks

kesetaraan gender global ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diatasi untuk mencapai kesetaraan gender di negara tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation, faktor utama yang membuat Afghanistan menjadi negara dengan risiko tinggi bagi perempuan adalah proses pembangunan negara yang menggabungkan sistem patriarkal (Purwati et al., 2018). Dalam konteks feminisme pada HI, sistem patriarkal ini dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan hak perempuan yang mengakar dalam struktur masyarakat dan berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender yang signifikan di negara tersebut. Feminisme Radikal secara khusus melihat struktur patriarki sebagai bentuk penindasan berdasarkan hierarki seksual, di mana posisi dominan dan hak-hak istimewa dalam berbagai aspek dikuasai oleh laki-laki (Novarin & Pattipeilhy, 2020).

Masyarakat Afghanistan juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pashtunwali, yang meresap ke semua lapisan masyarakat di negara tersebut dan menjadi elemen integral dalam proses pembangunan negara. Menurut Benson & Siddiqui, Pashtunwali dianggap sebagai hukum umum dengan nilai-nilai khusus terkait perempuan dalam masyarakat berbasis kesukuan memegang peran penting sebagai ibu, istri, dan penjaga tradisi (honor). Budaya Afghanistan, yang berstruktur patriarkal, memberikan kekuasaan kepada laki-laki, termasuk sebagai kepala keluarga (Benson & Siddiqui, 2014). Dalam masyarakat, terdapat pembagian yang jelas antara ranah publik dan privat, di mana dominasi laki-laki dalam kedua sektor ini berpotensi merendahkan eksistensi perempuan dan menempatkannya dalam opresi yang berkelanjutan (Purwati et al., 2018).

Hadirnya Taliban, sebuah gerakan radikal Islam telah menjadi salah satu penyebab utama konflik di Afghanistan. Dikutip dari Mawardi, Taliban, sebagai kelompok Islam yang dikenal karena pendekatan mereka yang keras dan konservatif dalam menyebarkan dan menerapkan ajaran Islam. Sejak awal berdirinya, Taliban telah diidentifikasi memiliki ambisi untuk menguasai Afghanistan sehingga menyebabkan kekhawatiran pada masyarakat setempat terkait kurangnya keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, khususnya hak-hak perempuan yang dibatasi secara signifikan (Mawardi et al., 2022).

Menurut Thomas, Taliban sering digambarkan sebagai pendorong utama penindasan terhadap perempuan di Afghanistan. Lebih lanjut, Kesengsaraan yang banyaknya terjadi kepada perempuan di Afghanistan telah menyita perhatian dunia, hak-hak perempuan terhimpit oleh norma-norma patriarki yang kuat dan penekanan politik. Pemerintahan Taliban memberlakukan kebijakan yang membatasi akses perempuan ke pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik (Thomas, 2021). Pemerintahan Taliban juga menerapkan larangan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Mereka yang melanggar aturan ini akan mendapatkan hukuman penjara atau dipukul di tempat umum. Taliban juga menentang pendidikan untuk anak perempuan yang berusia lebih dari 10 tahun. Karena tindakan ini, mereka dituding melanggar berbagai hak asasi manusia (Putra, 2021). Perempuan di Afghanistan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, Dimulai dengan larangan bekerja di luar rumah, diperlukan pendamping saat keluar rumah, hak pendidikan yang tidak diberikan, hingga posisi sebagai entitas yang subordinat (Mawardi et al., 2022).

Sebelum membahas lebih jauh mengenai isu gender di bawah Taliban, penting untuk mengetahui bahwa AS telah memberikan bantuan luar negeri kepada Afghanistan untuk rekonstruksi negara. Menurut Laporan SIGAR, “What We Need To Learn: Twenty Years of Afghanistan Reconstruction”, fokus utama bantuan AS adalah mempromosikan dan memberdayakan hak-hak perempuan Afghanistan. Sebagai negara pendonor utama di Afghanistan. melalui konsep Feminisme as National Interest, AS menekankan pentingnya mendorong hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender dan keamanan di Afghanistan, sebagai pembenaran untuk memerangi Taliban (SIGAR, 2022).

Pasca penarikan militer AS dari Afghanistan pada Agustus 2021, AS mengalihkan fokus kebijakan luar negerinya dari pembangunan negara menjadi bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban (Muralidharan, 2021). AS berkomitmen untuk mendukung rakyat Afghanistan

melalui upaya diplomatik dan bantuan, serta melibatkan aktor internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak perempuan, anak-anak, dan masyarakat Afghanistan secara umum. Ini menunjukkan bahwa AS masih memiliki kepentingan strategis di Afghanistan, meski pendekatannya berbeda dari sebelumnya (The White House, 2021). Ketidakadilan terhadap perempuan Afghanistan menarik perhatian Sunita Viswanath, seorang aktivis HAM yang bekerja di Sister Fund, sebuah organisasi amal di New York. Menurut artikel *The New Yorker*, Viswanath bersama dengan perempuan lainnya, termasuk Masuda Sultan, seorang pengusaha AS keturunan Afghanistan dan aktivis HAM, mendirikan *Women for Afghan Women* (WAW). WAW adalah sebuah NGO yang didirikan di New York pada tahun 2001 dengan misi memberikan bantuan kepada perempuan Afghanistan (Rozina, 2022).

Menurut situs web WAW itu sendiri, dijelaskan WAW adalah organisasi masyarakat sipil dengan dukungan dari pemerintah AS. WAW berdedikasi untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan, khususnya yang terpinggirkan. WAW memiliki 31 fasilitas di 13 provinsi di Afghanistan, yang melayani lebih dari 25.000 klien per tahun dengan layanan pengacara, konseling, dan shelter. WAW juga membantu komunitas diaspora Afghanistan di AS melalui pusat layanan di New York dan Washington DC. WAW merupakan organisasi hak-hak perempuan terbesar di Afghanistan, yang bekerja sama dengan pemerintah AS dan pihak lain untuk memperjuangkan kesetaraan gender, perdamaian, dan rekonsiliasi nasional di Afghanistan (Tadjbakhsh, 2021).

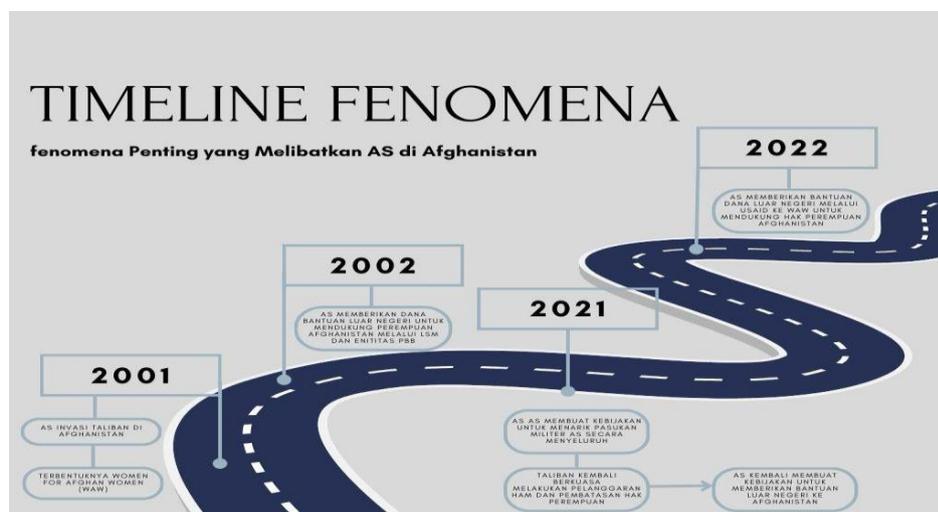
Meski Taliban tak memegang kekuasaan, perempuan Afghanistan tetap berhadapan dengan budaya patriarki dan praktik-praktik yang merugikan. WAW berupaya untuk mengubah norma-norma tersebut dan mendorong kesetaraan gender. Dengan dukungan dana dari AS, WAW telah mendirikan pusat-pusat layanan di berbagai provinsi dan melayani ribuan klien setiap tahun. Selain itu, WAW juga menyelenggarakan pelatihan hukum dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan. Namun, WAW sering kali dihadapkan pada tantangan dari kelompok-kelompok konservatif, dan bahkan staf serta klien WAW terkadang menghadapi ancaman kekerasan. Situasi menjadi

semakin sulit sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021 dan membatasi hak-hak perempuan dengan ketat. Sebagai respons, pemerintah AS memberikan bantuan dana luar negeri dan mendukung pendanaan untuk WAW (WAW, 2023)

Berdasarkan laporan resmi *Congressional Research Service: Afghan Women and Girls: Status and Congressional Action*, WAW telah menerima bantuan luar negeri dari AS dalam bentuk hibah, kontrak, dan donasi dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Sebagian besar dana bantuan internasional diterima oleh WAW melalui USAID, lembaga pemerintah AS yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan pembangunan luar negeri dan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara, termasuk Afghanistan. Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa antara tahun 2002 dan 2021, dana bantuan luar negeri sebesar hampir \$800 juta telah dialokasikan untuk program-program yang utamanya ditujukan untuk mendukung perempuan Afghanistan. Dana ini mendukung program yang dijalankan oleh LSM dan entitas PBB, salah satunya adalah WAW (Thomas, 2021).

Melalui situs web resmi USAID, pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan komitmen mereka untuk menyediakan dana bantuan internasional sebesar \$30 juta guna mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Afghanistan. Dana ini akan disalurkan melalui Badan PBB yakni UN Women, yang merupakan mitra dari WAW (USAID, 2022).

Gambar 1. 2 Timeline Fenomena Kehadiran AS di Afghanistan



Sumber:(Anugerah & Purba, 2021; *USAID*, 2022b; Women for Afghan Women, n.d.-b)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan dampak bantuan luar negeri AS melalui upaya WAW, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi ini dalam konteks politik, sosial, dan budaya Afghanistan yang kompleks dan dinamis. Di balik keraguan AS dalam mengakui kedaulatan pemerintahan Taliban, kebijakan AS di bawah pemerintahan Joe Biden telah mengimplementasikan kebijakan dengan membekukan aset Bank Sentral Afghanistan yang bernilai 9,5 miliar dolar AS. Langkah ini diambil sebagai bentuk kekhawatiran AS untuk mencegah Taliban mengakses dana tersebut. Dalam konteks ini, kontrol AS atas “dana Afghanistan” bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan oleh Taliban. Namun, hal ini telah menciptakan krisis baru bagi negara Afghanistan. Akibatnya, hampir semua bantuan internasional dari berbagai negara, termasuk Uni Eropa, Dana Moneter Internasional, dan organisasi internasional multilateral, telah menghentikan aliran dana dan bantuan lainnya ke Afghanistan. Hal ini menunjukkan bahwa AS terus memberikan siklus bantuan, krisis, dan bantuan lagi, yang menyebabkan kebingungan di Afghanistan karena tidak konsisten dengan janji-janji sebelumnya (Sahputra et al., 2022).

Mengingat kondisi tersebut, penting adanya kajian untuk mengetahui kepentingan AS melanjutkan bantuan luar negeri dalam konteks mendukung LSM seperti WAW, AS memiliki tanggung jawab moral terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Afghanistan, akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan sikap AS melalui kebijakan luar negerinya memulai penarikan militer dari Afghanistan, Joe Biden mengatakan “sudah saatnya mengakhiri perang selamanya” dan merasa bahwa Afghanistan bukan prioritas kebijakan Luar negeri AS (Eichensehr, 2021). Adanya keraguan AS melihat pemerintahan Taliban dalam mendukung hak-hak perempuan di Afghanistan. Namun, AS berkomitmen melanjutkan bantuan luar negeri untuk perempuan Afghanistan, sementara menolak mendukung pemerintahan Taliban yang tidak sah dan tidak demokratis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Foreign Aid AS melalui WAW, dalam mempromosikan hak-

hak perempuan di Afghanistan sekaligus memenuhi kepentingan nasional Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan paradigma liberalisme untuk memahami lebih lanjut, bagaimana bantuan luar negeri dari negara lain (pendonor) dapat dijadikan alat yang efektif untuk memajukan hak-hak perempuan di negara-negara konflik seperti Afghanistan. Meskipun AS telah memberikan dana untuk upaya pemberdayaan perempuan selama dua dekade terakhir, kondisi dan status perempuan di Afghanistan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana bantuan luar negeri AS, melalui upaya WAW, mempromosikan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Penelitian yang mengangkat konteks WAW dan bantuan luar negeri masih jarang dilakukan, padahal WAW adalah salah satu organisasi masyarakat sipil terbesar di Afghanistan yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Mengacu pada urgensi ini, kemudian peneliti tertarik menyusun penelitian berjudul : **“Foreign Aid Amerika Serikat Melalui Upaya Women for Afghan Women (WAW) dalam Mempromosikan Hak-Hak Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah ditulis di atas, maka penulis merumuskan masalah berupa **“Bagaimana *Foreign Aid* Amerika Serikat melalui WAW dapat dijadikan sebagai Instrumen Pemenuh Kepentingan Nasionalnya dalam Mempromosikan Hak-Hak Perempuan di bawah Pemerintahan Taliban ? ”**

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tahun 2021-2022 dan berfokus pada bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui Women for Afghan Women (WAW), yang bergerak dalam bidang pemberdayaan, pendidikan, dan perlindungan hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Pada tahun 2021-2022, merupakan momen penting dalam sejarah Afghanistan, yaitu saat terjadi perubahan kekuasaan dari pemerintah sebelumnya ke pemerintahan Taliban. Periode ini dipilih karena perubahan kekuasaan ini memiliki dampak signifikan terhadap kondisi perempuan di Afghanistan. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk memahami bagaimana bantuan luar negeri AS, melalui WAW, berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan di tengah kondisi politik dan sosial yang berubah-ubah dan kompleks tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi kepentingan nasional AS dalam agenda *Foreign Aid* yang diberikan melalui upaya WAW di Afghanistan.
2. Untuk mengetahui implementasi dan dampak dari bantuan luar negeri AS melalui upaya WAW terhadap kondisi perempuan di Afghanistan.
3. Untuk mengetahui motif dan faktor-faktor bantuan luar negeri yang mempengaruhi Afghanistan terutama dalam agenda perempuan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.
4. Untuk mengetahui kondisi perempuan Afghanistan melalui lensa Feminisme Liberal dan Feminisme dalam Islam

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dapat mengkaji dampak bantuan luar negeri AS yang diberikan melalui *organisasi Women for Afghan Women (WAW)* yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan advokasi bagi perempuan Afghanistan.
2. Penelitian ini dapat mengevaluasi implementasi dan tantangan dari program-program WAW dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan Afghanistan di berbagai sektor kehidupan.
3. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan bidang ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Politik, Hubungan internasional, Studi Kebijakan Luar Negeri dan Studi Gender.